

Executive Summary

Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra Ibu Kota Nusantara

Pengembangan kompetensi ASN daerah penyangga/ mitra Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki tingkat urgensi yang cukup tinggi untuk segera dipenuhi agar peran dukungan terhadap IKN dapat berjalan optimal di satu sisi serta peningkatan daya saing daerah disisi yang lainnya. Posisi serta kedudukan yang strategis karena berbatasan langsung dengan IKN telah memberikan tekanan dan peluang tersendiri bagi daerah penyangga/ mitra untuk dapat menghadirkan tata kelola pemerintahan yang juga menyelaraskan dengan tata kelola IKN.

Pemerintah daerah penyangga/ mitra IKN secara mendasar telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan kompetensi ASN-nya, meskipun dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada serta relatif belum fokus pada arah “penyiapan diri” sebagai bagian dari IKN. Dari hasil penggalian data di lapangan (penyebaran kuisioner dan *indepth-interview*) serta analisis data sekunder pada pemerintah daerah yang berbatasan langsung dengan IKN, yakni Pemerintah Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Setidaknya terdapat 8 (delapan) penyebab masalah terkait pengembangan kompetensi ASN daerah penyangga/ mitra IKN, 1) minimnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi, 2) ketidak sesuaian latar belakang pendidikan formal dengan jabatan ASN, 3) komitmen pimpinan daerah yang belum menjadikan pengembangan kompetensi sebagai salah satu program strategis daerah, 4) Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) belum disusun secara menyeluruh/belum ada, 5) asesmen kompetensi ASN yang belum dilakukan secara menyeluruh, 6) masih adanya daerah penyangga/mitra IKN yang belum memiliki analisis kebutuhan diklat, 7) model pengembangan kompetensi yang dilakukan daerah mitra IKN masih kurang variatif, dan 8) rotasi pegawai yang terlalu cepat.

Dalam analisis policy paper ini dipetakan pula kebutuhan kompetensi spesifik bagi ASN daerah penyangga/ mitra IKN. Kebutuhan kompetensi tersebut adalah kebutuhan yang

diekspresikan atau dinyatakan serta kebutuhan di masa mendatang sebagai implikasi kehadiran IKN oleh para ASN di daerah penyangga/ mitra IKN. Selanjutnya, beberapa jenis kompetensi yang telah disebutkan oleh masing-masing *key-informants* di setiap lokus akan dikelompokkan ke dalam kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural.

Kompetensi manajerial yang diungkapkan oleh masing-masing ASN di setiap lokus sebagai konsekuensi atas hadirnya IKN adalah kompetensi perencanaan kinerja, pemecahan masalah dan kolaborasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, negosiasi, komunikasi, berpikir kritis, dan berpikir strategis. Terlihat pula bahwa kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh seluruh daerah penyangga/ mitra IKN adalah berkaitan dengan bahasa asing, IT (Teknologi dan Informasi), manajemen aset, analisa kebijakan, dan inovasi. Lebih lanjut, beberapa kompetensi sosio-kultural yang perlu dikembangkan adalah hospitality (keramahan), *teamwork* (kerja sama), adaptif, dan mediasi. Sedangkan untuk jenis kebutuhan kompetensi khusus, disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi untuk menunjang potensi unggulan/ *flagship* meliputi sektor pariwisata, industry, perdagangan, dan pertanian.

Adapun kesamaan umum model pengembangan kompetensi yang seringkali dipraktekkan oleh seluruh daerah penyangga/ mitra IKN adalah tugas belajar pada jalur pendidikan; kemudian pelaksanaan model diklat, bimtek serta seminar melalui jalur pengembangan kompetensi klasikal; dan model webinar untuk jalur pengembangan kompetensi non-klasikal, relatif sama. Model pengembangan kompetensi lainnya seperti *Community of Practice*. Pengembangan kompetensi melalui Patok Banding juga pernah dilakukan.

Dari telaahan konteks permasalahan kebijakan yang ada, terdapat empat strategi penguatan kebijakan pengembangan kompetensi ASN daerah penyangga/ mitra IKN. Alternatif kebijakan tersebut yaitu (1). perluasan model pengembangan kompetensi yang lebih variatif dan berbiaya murah; (2) pengutamaan kebijakan pengembangan kompetensi ASN daerah penyangga/ mitra IKN; (3) pemenuhan kelengkapan dokumen perencanaan pengembangan kompetensi ASN penyangga/ mitra IKN; dan (4) pelibatan kementerian/

lembaga untuk transfer kompetensi dalam bingkai program afirmasi pengembangan kompetensi ASN penyangga/ mitra IKN.

Dari keempat alternatif strategi tersebut, pilihan kebijakan yang direkomendasikan untuk segera dilaksanakan adalah pengarusutamaan kebijakan pengembangan kompetensi ASN penyangga/ mitra IKN, sedangkan alternatif kebijakan lainnya (perluasan model pengembangan kompetensi yang lebih variatif serta pemenuhan kelengkapan dokumen perencanaan pengembangan kompetensi) dapat dilakukan secara beriringan serta saling melengkapi. Adapun bagi pemerintah pusat, pilihan kebijakan untuk melibatkan Kementerian/ Lembaga untuk transfer kompetensi dalam bingkai program afirmasi pengembangan kompetensi ASN penyangga/ mitra IKN menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar.